



RENJA

RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja tersebut berpedoman pada RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023-2026, dan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud.

Banjarnegara, 1 Agustus 2022
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



ESTI WIDODO, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19771014 199703 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
2.6 Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ...	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	55
BAB V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Banjarnegara	12
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara	25
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	29
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	36
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	37
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan yang diatur melalui Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan pembentukan tim penyusun, penelaahan rancangan awal RKPD, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, hingga pada penyempurnaan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang RKPD. Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga mengacu pada Renja Kementerian/Lembaga terkait, serta Renja Perangkat Daerah Provinsi terkait. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

- Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Tahun 2023 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Renja K/L Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;

- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA-DPA dalam Rancangan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2023, yang dalam penyusunannya didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan Tahun 2023;
- c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disusun berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.

BAB 2 : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dan atau pokok-pokok DPRD.

BAB 3 : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan tahun 2023.

BAB 4 : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran RKPD.

BAB 5 : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 terdiri dari 3 program, 12 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.012.456.000,-, dengan fokus utama pada meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik. Program/kegiatan/sub kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah yang meliputi:

1. Belum tersedianya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian yang lain.
2. Masih kurangnya jumlah aparatur dibanding dengan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja.
3. Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Belum terlaksananya sistem pengembangan pola karir aparatur pemerintah daerah yang jelas dan terukur.
5. Belum adanya sistem yang jelas dan terukur yang dijadikan tolak ukur peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.

Dari 3 program, 12 kegiatan, dan 27 sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah tersebut, program/kegiatan/sub kegiatan yang disetujui untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 3 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 10.621.295.000,-

Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021, terjadi beberapa perubahan yang meliputi penambahan atau

pengurangan pagu, penghapusan, penambahan atau pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan tersebut mengubah rincian dalam Renja Perangkat Daerah menjadi 3 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 9.492.153.684,-. Pada Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021, sub kegiatan yang bertambah meliputi :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
8. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
10. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
11. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur
12. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Dinamika yang terjadi selama tahun 2021 turut mempengaruhi keberhasilan pencapaian Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021, tercatat adanya hasil yang baik yang dikarenakan adanya pencapaian maupun pelampauan target maupun yang tidak memenuhi target.

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi 4 sub kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak tercapai 100% karena pengadaan instalasi gedung CAT tidak terlaksana terhambat karena penetapan anggaran pergeseran di akhir November.
 2. Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tidak tercapai 100% karena pemasangan *wallpaper* gedung CAT tidak terlaksana terhambat karena penetapan anggaran pergeseran di akhir November.
 3. Pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK tidak tercapai 100% karena Terdapat formasi yang tidak terisi karena tidak ada pelamar.
 4. Pada sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian tidak tercapai 100% karena pengadaan aplikasi sitem presensi android tidak terlaksana terhambat karena penetapan anggaran pergeseran di akhir November.
 5. Pada sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN tidak tercapai 100% karena terhambat belum turunnya izin Mendagri untuk melaksanakan seleksi terbuka JPT.
 6. Pada sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai tidak tercapai 100% karena usulan masih ada yang belum terbit.
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan meliputi 22 sub kegiatan, sedangkan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah 3 sub kegiatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan tujuan menggali informasi atas kendala yang dihadapi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Pendampingan secara intens dengan para pengelola kepegawaian seluruh OPD sehingga dapat meminimalisasi permasalahan dalam proses pelayanan administrasi kepegawaian (Kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun).
3. Koordinasi yang baik antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan instansi terkait diantaranya dengan BKN, KASN, KemenPAN dan RB.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka pada tahun perencanaan selanjutnya perlu diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, diantaranya:

1. Membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online* dengan sistem kepegawaian lainnya.
2. Membangun sistem/kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional.
3. Mengintensifkan penerapan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Elektronik Kinerja Kebijakan pembayaran tunjangan kinerja dikaitkan dengan hasil penilaian kinerja.
4. Menyusun dokumen *talent pool* dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dari hasil assessment/uji kompetensi pegawai.
5. Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang pola karier.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
s.d. Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP;	73,00 (BB)	70,43 (BB)	70,00	72,85	104,07	72,00	72,00	100%
		Nilai SKM	81,50	84,39	85,00	81,42	95,79	85,10	85,10	100%
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja yang berkualitas dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan kepegawaian yang memadai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	100%	35 orang	35 orang	100%	35 orang	35 orang	100%
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%
		Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	100%	100%	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100%
5.03.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 paket	100%	100%	9 paket	100%	9 paket	9 paket	100%
5.03.01. 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	50%	100%	0	0	3 unit	3 unit	100%
5.03.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit	100%	100%	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
5.03.01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	80%	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%	7 unit	7 unit	100%
	URUSAN KEPEGAWAIAN	Nilai Penerapan Sistem Merit	0,70 (B)	0,53 (K)	0,63 (B)	0,63 (B)	100	0,64 (B)	0,64 (B)	100%
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	45%	100%	100%	41,26%	41,26	55%	55%	100%
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Presentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	82%	100%	79,20 %	79,20%	100%	80%	80%	100%
		Presentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	76%	100%	72,95 %	72,95%	100%	74%	74%	100%
		Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	72%	100%	68,02 %	68,02%	100%	70%	70%	100%
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi	100%	94%	100%	86,61%	86,61%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)	2 lembaga	100%	2 lembaga	2 lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 dok	100%	2 dok	1 dok	50%	2 dok	2 dok	100%
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan struktural yang terisi	90%	100%	79,36 %	79,36%	100%	91%	91%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
		Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural	35%	100%	34,24 %	34,24%	100%	35%	35%	100%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 dok	100%	2 dok	0 dok	0%	2 dok	2 dok	100%
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	1 dok	100%	1 dok	0 dok	0%	2 dok	2 dok	100%
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60%	100%	54,10 %	54,10%	100%	60%	60%	100%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	5 orang	100%	10 orang	8 orang	80%	10 orang	10 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3 orang	-	-	-	-	3 orang	3 orang	100%
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	100%	50 orang	123 orang	72,35%	50 orang	50 orang	100%
		Jumlah ASN yg memperoleh pelayanan administrasi kesejahteraan ASN	1.200 orang	100%	1.500 orang	1.057 orang	100%	1.500 orang	1.500 orang	100%
		Jumlah pejabat yang menyampaikan pelaporan LHKPN	99 orang	100%	84 orang	84 orang	100%	99 orang	99 orang	100%
5.03.02.2.04.04	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	2 kasus	100%	4 kasus	4 kasus	100%	2 kasus	2 kasus	100%
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	2 orang	100%	4 orang	4 orang	100%	2 orang	2 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase Pengembangan SDM aparatur	40%	21,67%	37,52 %	37,52%	100%	40%	40%	100%
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40%	21,67%	37,52 %	37,52%	100%	40%	40%	100%
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	50%	70,20%	47,30 %	47,30%	100%	50%	50%	100%
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10 jp	N/A	N/A	N/A	N/A	10 jp	10 jp	100%
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50%	100%	10,55 %	10,55%	100%	40%	40%	100%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 orang	100%	65 orang	63 orang	96,92%	30 orang	30 orang	100%
		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Ujian Kedinasan)	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%	120 orang	120 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
	Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50%	100%	51,75 %	51,75%	100%	55%	55%	100%
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan	50 orang	100%	20 orang	35 orang	100%	12 orang	12 orang	100%
		Jumlah CASN yang mengikuti pengembangan kompetensi latsar	500 orang	100%	376 orang	376 orang	100%	330 orang	330 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
					Target Renja PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=7/6	(9)	(10)=5+7+9	(11)=10/4
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pelayanannya, Perangkat Daerah mengampu 57 Indikator. Dari 57 indikator tersebut, 47 indikator berstatus tercapai dan 10 indikator berstatus tidak tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian tersebut antara lain adalah:

1. Tertundanya proses seleksi CPNS formasi Tahun 2021 sehingga pemberkasan dan penerbitan NIP baru dapat terlaksana di tahun 2022.
2. Tidak terlaksananya kegiatan seleksi terbuka JPT karena terhambat oleh faktor izin dari Menteri Dalam Negeri yang belum turun sehingga berdampak pula pada kegiatan mutasi ASN.
3. Proses rotasi JPT baru mendapatkan izin Mendagri pada tanggal 31 Desember sehingga pelantikan baru dapat dilaksanakan bulan Januari 2022.
4. Penetapan perubahan anggaran di akhir bulan november sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan gedung kantor.

Dalam rangka mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, telah dilakukan upaya-upaya yang meliputi:

1. Pelaksanaan pelantikan jabatan fungsional hasil penyederhanaan birokrasi pada tanggal 30 Desember 2021.
2. Optimalisasi fasilitasi pengembangan kompetensi pegawai di masa pandemi dengan tetap mengikutsertakan ASN dalam pelatihan secara *streaming* menggunakan media *online zoom*.
3. Penerbitan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Melalui Elektronik Kinerja. Guna persiapan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kinerja kepada PNS kabupaten Banjarnegara, telah dilaksanakan penerapan penggunaan aplikasi e-kinerja sebagai pelaporan kinerja harian, bulanan dan tahunan pegawai secara *online*.
4. Mengintensifkan penanganan penegakan disiplin pegawai dengan pemantauan dan monitoring sehingga beberapa kasus dapat terselesaikan di tingkat OPD.

5. Melaksanakan seleksi CASN untuk mengisi sejumlah 381 formasi. Peserta yang lolos sebanyak 330 formasi.
6. Tetap melaksanakan kegiatan pelayanan kepegawaian yang melibatkan peserta yang cukup banyak dengan membagi jadwal kegiatan menjadi beberapa sesi; pada beberapa kegiatan dilaksanakan dengan menghadirkan perwakilan peserta dan selalu mentaati protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh dinas terkait dan atas ijin Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selebihnya mengikuti kegiatan melalui aplikasi *zoom meeting*, diantaranya dilaksanakan pada kegiatan pembagian SK Kenaikan Pangkat PNS 822 orang, Pembagian SK pensiun 496 orang, pembagian Piagam Penghargaan Satyalencana 123 orang, dan Pelantikan Pejabat Struktural 294 orang.
7. Menyelenggarakan fasilitasi/pelayanan administrasi kepegawaian diantaranya pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala; pemrosesan pemberian cuti pegawai; pemrosesan penerbitan karis/karsu, karpeg 348 orang dan kartu taspen sebanyak 376 orang; pemrosesan izin pengajuan perceraian; pemberian izin belajar; penggunaan gelar.

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK LPPD	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi			45%	48%	51%	54%	40,49%	40,49%	45%	48%	
2.	Persentase Pengembangan SDM aparatur			40%	50%	60%	70%	21,67%	37,52%	40%	45%	
3.	Nilai SAKIP			74,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)	80,00 (BB)	70,43 (BB)	72,85 (BB)	72,00 (BB)	74,00 (BB)	
4.	Nilai SKM			85,00	85,00	85,00	85,00	84,39	81,42	85,10	85,00	
5.			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	60%	65%	70%	75%	136,17%	54,10%	55%	60%	
6.			Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	55%	60%	65%	70%	1,91%	10,55%	20%	55%	
7.			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50%	60%	70%	80%	51,75 %	30,07%	40%	50%	

*) Kolom 3 diisi berdasarkan IKK outcome dalam lampiran Permendagri 18/202

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan dalam 2 urusan, yaitu urusan kepegawaian serta urusan Pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berdasarkan hasil evaluasi, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk tahun 2023 mencakup 2 urusan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah diantaranya adalah:

- 1) Masih kurangnya jumlah aparatur dibanding dengan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja.
- 2) Belum terlaksananya sistem pengembangan pola karir aparatur pemerintah daerah yang jelas dan terukur.
- 3) Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 4) Belum adanya sistem yang jelas dan terukur yang dijadikan tolak ukur peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah.
- 5) Belum tersedianya sistem informasi kepegawaian secara lengkap dan terintegrasi.

Permasalahan tersebut, jika tidak diselesaikan dapat menjadi *constraint* dalam pencapaian visi dan misi Bupati maupun capaian indikator lainnya. Beberapa dampak dari adanya permasalahan dan hambatan tersebut meliputi:

- 1) Capaian penilaian penerapan sistem merit yang rendah terutama dalam aspek pengembangan karir, promosi dan mutasi pegawai, penghargaan dan perlindungan ASN.
- 2) Capaian penilaian PMPRB yang rendah terutama dalam area manajemen ASN.
- 3) Capaian penilaian Indeks Profesionalitas ASN yang rendah terutama dalam aspek pengembangan SDM.
- 4) Capaian penilaian MCP KPK yang rendah terutama dalam area manajemen SDM.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi, peningkatan kualitas birokrasi, dan meningkatnya ekspektasi

pemangku kepentingan pengguna layanan akan meningkatkan kebutuhan akan adanya penyediaan produk layanan yang semakin baik. Oleh karena itu, diperlukan inovasi-inovasi dalam menunjang peningkatan pelayanan publik secara kontinyu. Beberapa tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu:

Tantangan dan peluang:

1. Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan peluang kepada BKD dalam pengembangan aplikasi sistem informasi kepegawaian;
2. Dukungan regulasi mengenai manajemen aparatur sipil untuk meningkatkan kinerja layanan kepegawaian serta meningkatkan kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur sipil Negara;
3. Dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas melalui Pendidikan formal maupun non formal;
4. Dukungan regulasi mengenai penyelenggaraan promosi jabatan/seleksi jabatan secara terbuka dalam rangka pengembangan pola karir aparatur pemerintah daerah yang jelas dan terukur; dan
5. Dukungan regulasi mengenai sistem penggajian Aparatur Sipil Negara dari pusat.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan tersebut, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis. Inventarisasi isu-isu strategis tahun 2023 didapatkan dari hasil analisis kondisi internal dan eksternal Kabupaten Banjarnegara sampai dengan tahun 2022. Isu-isu strategis ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi, pemanfaatan potensi dan masalah keberlangsungan pembangunan. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Menyusun dokumen *talent pool* dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang pola karier.
3. Melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat struktural agar penempatannya sesuai dengan sesuai kemampuan, kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki.

4. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi ASN.
5. Membangun sistem/kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional.
Membangun dan mengintegrasikan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online dengan sistem kepegawaian lainnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Berdasarkan hal tersebut, prioritas arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2023 meliputi:

1. Membangun dan mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian yang lain.
2. Menyusun dokumen *talent pool* dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi dan kinerja).
3. Menyusun dan menetapkan kebijakan tentang pola karir.
4. Melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat struktural dan pelaksana potensial agar penempatannya sesuai dengan kemampuan, kompetensi dan profesionalitas yang dimiliki.
5. Meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam program pengembangan kompetensi ASN.
6. Membangun sistem/kebijakan perlindungan pegawai di luar dari jaminan Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	Nilai SAKIP		73,00 (BB)	9.871.110.504	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	Nilai SAKIP		73,00 (BB)	9.871.110.504
		Nilai SKM		81,50			Nilai SKM		81,50	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	4.947.197.504	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	4.947.197.504
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan kepegawaian yang memadai		100%			Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan kepegawaian yang memadai		100%	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel		100%		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel		100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dok	4.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dok	4.000.000
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 orang	3.998.495.504	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 orang	3.998.495.504

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dok	94.402.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dok	94.402.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 dok	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5 dok	2.000.000
		Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun		1 dok			Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun		1 dok	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	10.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 paket	300.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 paket	300.000.000
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	150.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 unit	12.500.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 unit	12.500.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	94.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	94.800.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	196.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	196.000.000
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit	15.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		7 unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		7 unit	20.000.000
B.	URUSAN KEPEGAWAIAN	Nilai Penerapan Sistem Merit		0,70		URUSAN KEPEGAWAIAN	Nilai Penerapan Sistem Merit		0,70	
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya		60%			Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya		60%	
2.	Program Kepegawaian Daerah	Presentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif		82%	1.378.580.000	Program Kepegawaian Daerah	Presentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif		82%	1.378.580.000
		Presentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif		76%			Presentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif		76%	
		Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		72%			Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		72%	
2.1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi		100%		Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi		100%	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		2 dok	3.500.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		2 dok	3.500.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 dok	900.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 dok	900.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi		1 dok	6.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi		1 dok	6.500.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)		2 lembaga	50.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)		2 lembaga	50.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 dok	64.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 dok	64.000.000
2.2	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan struktural yang terisi		90%		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan struktural yang terisi		90%	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		4 dok	35.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		4 dok	35.000.000
		Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural		30%			Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural		30%	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2 dok	18.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2 dok	18.000.000
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 dok	195.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 dok	195.000.000
		Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment</i>		1 dok (376 orang)			Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment</i>		1 dok (376 orang)	
2.3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100%		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100%	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		5 orang	36.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		5 orang	36.000.000
2.4	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin		100%		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin		100%	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 dok	10.580.000	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 dok	10.580.000
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		3 orang	55.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		3 orang	55.000.000
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		50 Orang			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		50 Orang	
		Jumlah ASN yg memperoleh pelayanan administrasi kesejahteraan ASN		1.200 orang			Jumlah ASN yg memperoleh pelayanan administrasi kesejahteraan ASN		1.200 orang	
		Jumlah pejabat yang menyampaikan pelaporan LHKPN		99 orang			Jumlah pejabat yang menyampaikan pelaporan LHKPN		99 orang	
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		2 orang	5.000.000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		2 orang	5.000.000
		Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		2 kasus			Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		2 kasus	
C.	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase pengembangan SDM aparatur		45%		URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase Pengembangan SDM aparatur		45%	
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		10jp	3.545.333.000	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		10jp	3.545.333.000
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		40%			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		40%	
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		50%			Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		50%	
3.1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		%		Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		%	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		30 orang	60.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		30 orang	60.000.000
		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Ujian Kedinasan)		100 orang			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Ujian Kedinasan)		100 orang	
3.2	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		60%		Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		60%	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan		50 orang	3.485.333.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan		50 orang	3.485.333.000
		Jumlah CASN yang mengikuti pengembangan kompetensi latsar		500 orang			Jumlah CASN yang mengikuti pengembangan kompetensi latsar		500 orang	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		3 laporan			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		3 laporan	
					9.871.110.504					9.871.110.504

Berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2023, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang belum terlaksana di tahun 2021 dianggarkan Kembali di tahun 2023.
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
3. Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN dianggarkan untuk uji kompetensi peserta seleksi terbuka JPT serta uji kompetensi staf potensial dan pejabat struktural eselon III dan IV.
4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar dilaksanakan untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan fungsional serta latsar CASN.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan musrenbang kecamatan dan forum konsultasi publik telah disampaikan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui aplikasi SIPD. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	N/A				

2.6. Penelaahan Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Berdasarkan hasil reses anggota DPRD, melalui aplikasi SIPD telah disampaikan usulan program dan kegiatan. Usulan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Banjarnegara

No	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Validasi
	N/A				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang dimaksud adalah penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Visi Pembangunan Tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan yaitu Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat lima (5) fokus pembangunan yaitu :

1. Pembangunan Manusia, meliputi: Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial; SDM Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Pembangunan Karakter Bangsa.
2. Pembangunan Ekonomi, meliputi: Pangan; Energi; dan Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital.
3. Pembangunan Kewilayahan, meliputi: Sentra-sentra Pertumbuhan; Komoditas Unggulan Daerah; dan Pertumbuhan Perkotaan.
4. Pembangunan Infrastruktur, meliputi: Transportasi; Telekomunikasi; Sumber Daya Air; dan Perumahan dan Pemukiman.
5. Pembangunan Politik, Hukum dan Regulasi Pertahanan dan Keamanan, meliputi: Hukum dan Regulasi; Pertahanan dan Keamanan; dan Politik.

Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan strategis di tingkat nasional dan internasional, khususnya untuk mengisi pelaksanaan otonomi daerah.

Kebijakan pengembangan sumber daya aparatur pada dasarnya adalah pembangunan sumber daya manusia aparatur yang profesional, netral dari pengaruh kekuatan politik, berwawasan global, bermoral tinggi, serta mempunyai kemampuan berperan sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa satu NKRI.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 ayat 21 menyebutkan bahwa BKN adalah lembaga pemerintah Non Kementrian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional. Undang-undang ini juga mengatur bahwa untuk menjadikan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip *merit* dalam pelaksanaan manajemen PNS yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja serta adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit, asal usul, jenis kelamin, umur dan kondisi kecacatan.

Salah satu kewenangan yang kemudian oleh pemerintah pusat diserahkan kepada daerah adalah kewenangan di bidang kepegawaian (desentralisasi di bidang kepegawaian), sehingga berdasarkan hal tersebut, kemudian daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sistem pada Renstranya masing-masing.

BKD Kabupaten Banjarnegara merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembangunan urusan penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapabilitas aparatur daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui perumusan kebijakan mengenai kepegawaian, pelaksanaan kebijakan

mengenai kepegawaian, pelaksanaan administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan fungsi pembinaan kepegawaian lainnya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka BKD Kabupaten Banjarnegara di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah.

Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di BKD Kabupaten Banjarnegara, maka dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di BKD Kabupaten Banjarnegara telah berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan telah berakhirnya masa perencanaan dalam Renstra 2017- 2022 dan belum disusunnya dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode berikutnya, maka Badan Perencanaan Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Banjarnegara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025. Dokumen tersebut merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 3 Tahun 2009.

Visi pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 – 2025 adalah :

“BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN”

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur budaya masyarakat.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian lokal khususnya pertanian, yang berorientasi pada keunggulan komparatif, kompetitif dan kooperatif dengan berbasis pada potensi lokal sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan

berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan yang sehat. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi regional yang didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja yang berkualitas dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan yang ditandai dengan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekayaan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, meningkatnya kesadaran sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mengurangi resiko bencana alam.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan sistem dan iklim demokrasi, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya kualitas tata air (air bersih, irigasi, bendung) yang mendukung terciptanya ketahanan pangan, meningkatnya jaringan infrastruktur jalan, transportasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi, wisata dan mampu membuka isolasi wilayah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, terpenuhinya perumahan yang layak huni yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya untuk mengatasi wilayah yang kumuh.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan menurunnya kuantitas dan kualitas

penyandang sosial, meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kesatuan dan persatuan serta kerukunan masyarakat, meningkatnya perlindungan dan pengayoman masyarakat terhadap segala tindak kejahatan, menurunnya kasus kekerasan, berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum dan penegakan HAM.

Upaya perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah, yang diukur dengan parameter peningkatan kualitas manusia melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. RPJM Daerah Pertama (2005 - 2009)
2. RPJM Daerah Kedua (2010 - 2014)
3. RPJM Daerah Ketiga (2015 - 2019)
4. RPJM Daerah Keempat (2020 - 2024)

Untuk rencana kerja tahun 2023 mengacu pada RPJMD Keempat, ditujukan untuk optimalisasi pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agropolitan, mencakup tahapan sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur agama dan budaya masyarakat, dengan fokus pada:
 - a. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berkompentensi, serta kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang sesuai dengan iptek, jenjang pendidikan lebih tinggi, dan pangsa pasar kerja.

- b. Pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
 - c. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor industri dan pertanian.
 - d. Pengembangan riset yang mengarah pada penciptaan teknologi baru.
 - e. Pemantapan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat.
 - f. Pemantapan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan yang profesional, serta didukung oleh sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal.
 - g. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri.
 - h. Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
 - i. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral, dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
 - j. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional maupun internasional.
 - k. Pemantapan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama disertai pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar, memperhatikan

kelestarian lingkungan, serta pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dengan fokus pada:

- a. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.
- b. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
- c. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor.
- d. Pemantapan kualitas dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
- e. Meningkatkan keragaman kegiatan perekonomian kawasan agropolitan dan wilayah penyangganya.
- f. Pembangunan industri yang terarah sesuai dengan kluster dan potensi di daerah yang bersangkutan, serta memperhatikan tata wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan teratur.
- g. Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.
- h. Pelestarian sumber daya genetik berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- i. Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- j. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana.

- k. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
 - l. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
 - m. Pemantapan kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, pengurangan dan pengentasan kemiskinan.
 - n. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
 - o. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.
 - p. Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/ kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur utama dalam membangun pertahanan negara dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
 - q. Pemantapan perlindungan terhadap masyarakat, penghargaan yang tinggi terhadap penegakan hukum dan peradilan untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b. Pemantapan sistem budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
 - c. Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
 - d. Pemantapan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM.
 - e. Pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.
 - f. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Banjarnegara dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.
 - g. Semakin terbukanya peluang investasi domestik atau investasi asing untuk masuk ke daerah melalui perbaikan iklim investasi dan kebijakan yang mendukung dengan adanya kemunculan kutub-kutub pertumbuhan yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian.
 - h. Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan saling mendukung satu sama lain serta sistem kelembagaan yang mantap dan terintegrasi.
 - i. Memperluas kerja sama dengan institusi nasional atau internasional yang akan mendukung perkembangan industri pertanian.
10. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan antara perdesaan dan perkotaan.
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, dengan fokus pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang andal.
- b. Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup.
- c. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi, dan hukum; pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya.
- g. Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas 41 (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.
- h. Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah kecamatan untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal.

- i. Penciptaan Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW Kabupaten) sebagai daerah pertanian yang memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi, dan tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tersebut, maka BKD sebagai OPD Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mendukung dengan menetapkan tujuan jangka menengah BKD, yaitu : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2.2 Sasaran :

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, Misi, dan Tujuan. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan, maka Sasaran yang akan dicapai adalah :

- 1) Meningkatnya profesionalitas ASN.
- 2) Meningkatnya kompetensi ASN.
- 3) Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien.

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan instrumen untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi BKD. Sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pelaksanaan Manajemen Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian Daerah menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	Nilai SAKIP		73,00 BB	9.871.110.504	APBD		74,00 BB	9.134.860.404
		Nilai SKM		81,50				81,75	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%	4.947.197.504	APBD		100%	5.137.360.404
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dan kepegawaian yang memadai		100%				100%	
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD yang berkualitas dan akuntabel		100%		APBD		100%	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 dok	4.000.000	APBD		5 dok	4.064.900
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		100%				100%	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 orang	3.998.495.504	APBD		33 orang	3.998.495.504
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 dok	94.402.000	APBD		1 dok	95.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		5 dok	2.000.000	APBD		5 dok	2.000.000
		Jumlah dokumen laporan survey kepuasan masyarakat yang tersusun		1 dok				1 dok	
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%				100%	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 paket	10.000.000	3 paket		3 paket	12.000.000
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9 paket	300.000.000	9 paket		9 paket	400.000.000
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 unit	150.000.000	APBD		1 unit	200.000.000
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 unit	12.500.000	APBD		3 unit	20.000.000
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	94.800.000	APBD		12 laporan	94.800.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	196.000.000	APBD		12 laporan	197.000.000
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 unit	50.000.000	APBD		5 unit	60.000.000
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 unit	15.000.000	APBD		2 unit	25.000.000
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 unit	20.000.000	APBD		7 unit	29.000.000
	URUSAN KEPEGAWAIAN	Nilai Penerapan Sistem Merit		0,70				0,71	
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya		60%				60%	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Presentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif		82%	1.378.580.000			27	1.417.500.000
		Presentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif		76%				149	
		Persentase pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		72%				200	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase formasi ASN yang terisi		100%				100%	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		2 dok	3.500.000	APBD		2 dok	5.000.000
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 dok	900.000.000	APBD		1 dok	900.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		1 dok	6.500.000	APBD		1 dok	6.500.000
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi (hibah)		2 lembaga	50.000.000	APBD		2 lembaga	50.000.000
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		2 dok	64.000.000	APBD		2 dok	65.000.000
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan struktural yang terisi		90%				90%	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		4 dok	35.000.000	APBD		4 dok	50.000.000
		Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural		30%				30%	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		2 dok	18.000.000	APBD		2 dok	20.000.000
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 dok	195.000.000	APBD		2 dok	200.000.000
		Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Assessment</i>		1 dok				1 dok	
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100%				100%	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		5 orang	36.000.000	APBD		5 orang	45.000.000
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin		100%				100%	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1 dok	10.580.000	APBD		1 dok	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		3 orang	55.000.000			3 orang	55.000.000
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		50 Orang		APBD		50 Orang	
		Jumlah ASN yg memperoleh pelayanan administrasi kesejahteraan ASN		1.200 orang				1.200 orang	
		Jumlah pejabat yang menyampaikan pelaporan LHKPN		99 orang				99orang	
5.03.02.2.04.04	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		2 orang	5.000.000	APBD		2 orang	6.000.000
		Jumlah penyelesaian pelanggaran disiplin ASN		2 kasus				2 kasus	
5.04	URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Persentase Pengembangan SDM aparatur		45%				45%	
5.04.01	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		40%	3.545.333.000			40%	2.580.000.000
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural		50%				50%	
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		10jp				10jp	
5.04.01.1.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		2,5%				2,5%	
5.04.01.1.01.04	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		30 orang	60.000.000	APBD		30 orang	80.000.000
		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (Ujian Kedinasan)		100 orang				100 orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.04.01.1.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		60%				60%	
5.04.01.1.02.04	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan		50 orang	3.485.333.000		diklat latsar,	50 orang	2.500.000.000
		Jumlah CASN yang mengikuti pengembangan kompetensi latsar		500 orang				500 orang	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, kepemimpinan, dan Prajabatan		3 laporan					3 laporan
					9.871.110.504				9.134.860.404

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada perangkat daerah merupakan program prioritas dalam Renstra 2023-2026. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Pemilihan untuk masing-masing program/kegiatan di uraikan sebagai berikut

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- 3) Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN

III. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Latsar

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah selanjutnya menjadi platform operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan programnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka sasaran pembangunan daerah tahun 2023. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 disepakati.
2. Kerangka pendanaan dalam Renja Perangkat Daerah masih bersifat sementara, sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan pagu yang disebabkan oleh pengurangan, penambahan, dan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan maupun antar sub kegiatan dalam kerangka penyusunan anggaran secara terpadu dan berbasis kinerja.
3. Renja Perangkat Daerah menjadi acuan bagi Kepala Perangkat Daerah dan segenap jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal : 1 Agustus 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA


ESTI WIDODO, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19771014 199703 1 006